

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMASETELAH
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 (STUDY KASUS PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR TAHUN 2008-2014)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh
Rahman
NIM. 10500110087

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari, terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2014
Penyusun,

Rahman
NIM. 10500110087

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974*.", yang disusun oleh saudara Rahman, Nim: 10500110087, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 M; bertepatan dengan 01 Rabiul Awal 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 02 Maret 2015 M.

11 Jumadil Awal 1436 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, S.H., M. Hum	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Jumadi, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. M. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Munir Salim, M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.
NIP. 19570414 198603 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara, Rahman. NIM: 10500110087 Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" Memandang bahwa proposal skripsi tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk ujian manaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 1 Desember 2014

Pembimbing I



Drs. H. Munir Salim MH
NIP. 19531231 197803 1 006

Pembimbing II



Drs. H.M Saleh Ridwan, M.Ag
NIP. 19640601 199303 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun selalu semangat dan kuat dalam menyelesaikan karya ilmiah penyusunan skripsi ini yang berjudul *Pelaksanaan Pembagian Harta bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008-2013)*.

Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw sertakeluarga yang tercintadan orang-orang yang mengikuti jejak beliau.

Adapun maksud dari penyusunan tugas akhir ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penyusunan ini penyusun mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penyusun peroleh selama ini, khususnya dalampendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta hasil penelitian penyusun di Pengadilan Agama Makassar

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Hamsir, SH.,M.Hum, Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Ibu Istiqamah, SH.,MH., serta staf jurusan Ilmu

Hukum, yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusun lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan karya ilmiah ini.

3. Bapak Drs. H. Munir Salim, MH. Selaku Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sebagai Pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi Ilmu terkait judul yang diangkat penyusun dan Bapak Drs. H. Saleh Ridwan, M.Ag., sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait judul yang diangkat penyusun.
4. Bapak yasim Irba, SH., MH., selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar sebagai Pembimbing saya di Pengadilan Agama yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait judul yang diangkat penyusun.
5. Bapak Amiruddin selaku Panitra Pengadilan Agama`1 Makassar yang telah banyak membantu selama proses penelitian penyusun di Pengadilan Agama Makassar.
6. Kedua orang tua yang saya cintai dan hormati Bapak H. Nuhring dan IbuHj. Aminah yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya sejak lahir hingga dewasa ini, mengajarkan arti hidup, memberikan segalanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan saya sejak kecil hingga saat ini, semua jasa orang tua yang telah membiayai pendidikan saya dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang dengan penuh perhatian mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semua jasa-jasanya yang tidak akan mampu saya tuliskan dalam kata pengantar ini, karena begitu banyak pengorbanan yang dilakukan kedua orang tuasaya. Semoga

Allah swt senantiasa memberikan kesehatan dan membalas semua yang kalian berikan kepada saya.

7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2010 khususnya Ilmu Hukum 5.6 terimakasih atas kebersamaan kalian semua selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang telah banyak memberikan masukan dan arti kebersamaan kepada saya.
8. Teman-teman KKN Profesi UIN Alauddin Makassar Angkatan 59 tahun 2014 Kelurahan Bonto Perak Kecamatan Pangkajene yang telah banyak memberikan motivasi kepada saya selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Akhir kata penyusun berharap kiranya tugas penyusunan karya ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum acara perdata, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pemerintah khususnya bagi penegak hukum. Amin yaarabbal alamin.

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Rahman
10500110087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	11
B. Tinjauan tentang Perceraian.....	23
C. Tinjauan Tentang Harta Bersama.....	29
D. Kerangka Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Instrumen Penelitian.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar	39
B. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Makassar Tata Cara Prosedur Pelaksanaan dan Pembagian Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar	43
C. Kendala-Kendala Yang Timbul terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Makassar	52

D. Putusan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama atau Gono-Gini di Pengadilan Agama Makassar	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61



ABSTRAK

Nama : Rahman

NIM : 10500110087

Jurusan : Ilmu Hukum

**Judul : Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian
Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus mengenai Perceraian yang menimbulkan pembagian harta bersama. Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama.

Tujuan penulisan ini adalah untuk: 1). Mengetahui Bagaimana pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974? 2). Apa sajakah kendala yang timbul dalam pembagian harta bersama setelah perceraian? 3). Apakah putusan Hakim terlaksana dengan baik atau tidak terhadap pembagian harta bersma atau gono gini?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian Di Pengadilan Agama Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak terwujud sepanjang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan tidak termasuk bawaan dan harta pribadi adalah harta

bersama, sebagaimana diatur secara explicit dalam Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 serta Pasal 65 ayat (1) huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut pelaksanaannya.

Putusan hakim dalam pembagian harta bersama atau gono-gini di Pengadilan Agama Makassar semua putusan hakim yang mengenai harta besama sudah terlaksana dengan baik, karena telah berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku baik Undang-undang No 1 tahun 1974.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang paling penting bagi individu, dalam perkawinan dan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa.

Berawal dari pernikahan ini lah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga, ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan.

Dalam keluarga suami istri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana suatu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sehingga bisa di bayangkan jika tanpa suami ataupun istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakat pun tidak akan pernah ada untuk membentuk kasatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Semua individu yang sudah memasuki kehidupan rumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil, dan makmur.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga sehingga diperlukan perjuangan yang mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya. Hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang sangat bisa mengoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian.

Di dalam Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber utama dari hukum Islam tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai harta bersama, namun Allah Swt. memberikan kewenangan bagi setiap orang (laki-laki dan perempuan) mengupayakan hak terhadap apa yang di usahakannya. Sebagaimana dalam Qs. An-Nisa/4 : 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣١﴾

Artinya:

dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sehubungan dengan ayat di atas, maka untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan upaya untuk mengisi kekosongan hukum dengan cara melakukan ijtihad, sehingga masalah yang timbul karena tidak adanya ketentuan yang jelas baik dalam Al-Quran maupun Hadis dapat diselesaikan.

Perinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit. suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya.

Baik suami maupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penjelasan dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka berulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke Pengadilan untuk di cari jalan keluar yang terbaik.

Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada Pengadilan untuk menjelaskan permasalahan suami istri tadi. Pengadilan akan membuka kembali pintu perdamaian

kepada para pihak dengan cara musyawarah memakai penengah yakni Hakim. Untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejumlah mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat. Pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat. Perceraian adalah kata sulit yang dilakukan tapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:¹

Pasal 35 (1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 45.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bersama dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Hal yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian. Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan pembagian harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan tentunya penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan penjelasan-penjelasan diatas maka adalah sangat menarik untuk mengangkat suatu permasalahan yang terkait dengan masalah perceraian dan pembagian harta bersama dengan Judul Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni Pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketetapan hukumnya di Pengadilan Agama.

C. Rumusan Masalah

Untuk membahas masalah penerapan ketentuan-ketentuan pembagian harta perkawinan setelah terjadi perceraian akan mempunyai cakupan yang luas serta memerlukan penganalisaan yang lebih memadai. Oleh karena itulah perlu dibatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974?
2. Apa sajakah kendala yang timbul dalam pembagian harta bersama setelah perceraian?
3. Apakah putusan Hakim terlaksana dengan baik atau tidak terhadap pembagian harta bersama atau gono gini?

D. Kajian Pustaka

Secara umum, kajian pustaka merupakan bagian di mana calonpeneliti harus mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dia teliti. Ini dimaksudkan agar mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo “perkawinan bertujuan untuk

memperoleh keturunan memenuhi nalurinya sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dengan memperbesar rasa tanggungjawab.

Zuhri Hamid dalam bukunya Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furkah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.

Ahmad Rofiq dalam bukunya Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu :

- a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.

- b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
2. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk :
- a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 - b. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
- a. Harta milik bersama.
 - b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
 - c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian:

1. Untuk memahami Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis masalah-masalah yang timbul dalam putusnya perkawinan dan pembagian harta bersama baik dalam hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
3. Untuk mengetahui sejauh mana putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama terlaksana dengan baik.

b. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.

2. Dari Segi Pragmatis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, dalam pelaksanaan pembagian Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Makassar 2008-2014.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum.²

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

²M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,2000), h. 20.

Ikatan batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata tetapi ikatan batin harus tetap ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan sangat rapuh sekali, ikatan ini mengabungkan hubungan batin antara laki-laki dan wanita dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti cinta, rindu dan kasih sayang serta perasaan lain yang saling membutuhkan satu sama lainnya.

Kedua ikatan di atas, merupakan pokok dari perkawinan sebab tanpa ikatan lahir dan batin tadi maka perkawinan tidak ada artinya dan tidak ada jaminan yang kuat perkawinan itu akan bisa bertahan sampai ajal menjemput si suami dan istri atau dengan kata lain perkawinan akan dapat berujung pada perceraian.

Kedua unsur itu, baik lahir maupun batin akan selalu membutuhkan satu sama lainnya, sehingga apapun yang terjadi terhadap salah satu pasangannya yang lainnya akan ikut merasakan, rasa sedih dan gembira dirasakan bersama oleh pasangan yang disebut suami dan istri itu. Unsur-unsur yang ada dalam perkawinan itu dapat disimpulkan antara lain:

- a. Perjanjian suci antara seorang pria dan wanita.
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materil maupun spiritual.³

Istilah perkawinan dalam Agama Islam disebut dengan kata Nikah yang artinya “Melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu

³M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, h. 45.

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah”.⁴

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, untuk melakukan persetujuan atau perjanjian antara laki-laki dan wali dari pihak perempuan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh agama.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perkawinan menurut Hukum Islam hukumnya adalah :

1. Wajib, bagi seorang laki-laki yang mengkhawatirkan dirinya melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh agama serta bagi perempuan yang tidak dapat menghindar dari perbuatan orang jahat jika ia tidak kawin.
2. Sunat, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin dan merasa mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang punya hajat dan mampu patuh kepada suaminya
3. Mubah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang belum punya hajat kawin.
4. Makruh bagi laki-laki yang belum mampu dan tidak punya hajat kawin maupun bagi perempuan.
5. Haram bagi seseorang yang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud tidak melaksanakan perkawinan.⁵

⁴Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.8.

⁵Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta 1978), h. 4.

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur⁶. Menurut R Soetojo Prawirohamidjo“ Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan memenuhi nalurnya sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dengan memperbesar rasa tanggungjawab.⁷

Tujuan dari perkawinan menurut ajaran Agama Islam adalah “Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari’ah”.

Lebih lengkap tujuan dan faedah perkawinan dibagi menjadi lima hal, antara lain:

1. Memperoleh keturunan yang sah untuk melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi baris pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Tp : Mandar Maju, 1990), h. 24.

⁷R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia* (tp: Airlangga University Press, 1990, h. 28

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan faedah perkawinan diatas dapat lebih dijelaskan satu persatu.

1. Tujuan yang pertama ialah memperoleh keturunan, ini merupakan pokok dari tujuan perkawinan, setiap orang yang telah melansungkan perkawinan tentu ingin memiliki keturunan, tanpa keturunan kehidupan rumah tangga akan terasa hambar walau dari segi materi berkecukupan. Keinginan memiliki anak sangatlah wajar karena nantinya anak akan melanjutkan kehidupan keluarga ke depan dan membantu orang tua dimasa tuanya, tentu dengan harapan anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan lingkungannya. (Soermiyati)
2. Tujuan kedua, memenuhi tuntutan naluriah, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda jenis kelaminnya, maka keduanya memiliki daya tarik untuk memikat lain jenisnya, melahirkan gairah baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan hubungan, dengan perkawinan hubungan tersebut akan menjadi sah dan halal.
3. Tujuan ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, salah satu yang membuat manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah hawa nafsu dengan tidak adanya penyaluran yang sah, maka baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal, sedemikian buruknya pengaruh hawa nafsu ini sehingga manusia lupa mana yang baik dan yang buruk. Manusia adalah makhluk lemah yang sulit mengendalikan hawa nafsunya.
4. Tujuan Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang,

salah satu alat untuk memperkokoh perkawinan adalah dengan cinta dan kasih sayang, dasar ini akan membuat keluarga bahagia, sehingga akan terus berlanjut dari keluarga yang bahagia akan menjadi masyarakat yang harmonis pada tatanan yang lebih tingginya.

5. Tujuan kelima menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab, sebelum perkawinan biasanya baik laki-laki dan perempuan tidak memikirkan soal kehidupan karena masih bertumpu pada orang tua, tetapi setelah perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana bertanggungjawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari rejeki yang halal untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Istri akan lebih giat membantu dan mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai dan bahagia terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak, sehingga aktifitas dan tanggungjawab suami istri semakin besar.

3. Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan dan sesudah melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, 7 dan 8 menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, antara lain:

Pasal 6 berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam adalah:

1. Adanya kata sepakat diantara calon suami dan istri sehingga tidak ada unsur paksaan.
2. Pihak-pihak sudah baliqh (dewasa)

3. Tidak ada halangan yang dapat merintangan perkawinan yang akan dilangsungkan.

Selain syarat-syarat perkawinan diatas, masih terdapat rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

a. Adanya calon mempelai

- (1) Calon suami harus berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (2) Bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harus seijin orang tuanya, apabila kedua orang tuanya tidak ada atau telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyampaikan kehendak maka harus mendapat ijin dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan apabila salah satu atau lebih tidak bisa menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.
- (3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (4) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.
- (5) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- (6) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat berlangsung.
- (7) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara, persetujuan dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang berguna untuk menikahkannya, wali nikah itu adalah”

- (1) Seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yaitu muslim dan akil baliqh.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang lebih berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang se ayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.

4. Akibat Perkawinan

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum yaitu:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbul hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggalnya.

6. Berhak saling waris mewaris antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tuanya.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.
9. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban oleh suami atau istri setelah berumah tangga, lebih jelas pasal tersebut berbunyi : “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Sementara Pasal 31, 32, 33, 34 lebih menegaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tersebut. (M Idris Ramulyo)

Pasal 31 menyatakan:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 :

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 :

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam adalah:⁸

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahma yang menjadi sendi dasardari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya
3. Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77, Kompilasi Hukum Islam).

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri di atas, menjelaskan bahwasanya pergaulan suami istri dalam perkawinan seharusnya:

1. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang tentram.
3. Pergaulan yang meliputi rasa saling cinta mencintai.

⁸Lihat Pasal 77, Kompilasi Hukum Islam.

4. Pergaulan yang disertai rahma yaitu saling memerlukan dan membela dimasa tua.

Adanya akibat dari perkawinan itu menjadikan suami dan istri saling memahami bagaimana tujuan berumah tangga dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing, sehingga terwujud keluarga yang bahagia dan juga akan membentuk masyarakat yang harmonis.

B. *Tinjauan tentang Perceraian*

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan mengunanya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. perceraian dan;
- c. atas keputusan Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa alasan perceraian itu dapat dilakukan, ini tercantum dalam Pasal 116 yang antara lain menyebutkan:⁹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematatpenjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung perkawinan.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan Agama dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

1. Tata Cara Perceraian

Mengenai tata cara perceraian ini diatur oleh Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

Pasal 39 berbunyi:

⁹Lihat Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40 menyatakan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dari bunyi pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, sementara agama yang lain ke Pengadilan Negeri.

Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-131 memuat tentang bagaimana tata cara dan pelaksanaan jika suami dan istri akan bercerai, antara lain:

1. Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta

penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
5. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
6. Bila suami tidak mengucapkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin talakbaginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh.
7. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan Pengadilan Agama.

2. Akibat dari Suatu Perceraian

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan :

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ibu atau bapak.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas

permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan menginggit kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Sedangkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak dapat melaksanakan kewajiban itu, maka Pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

C. Tinjauan Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama. Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁰ Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal :

1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 200.

4. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai¹¹ hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dengan melihat kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , h. 200.

2. Macam-macam Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain :

1. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.¹²

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggungjawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan Pengadilan.

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :¹³

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu :

¹²Abdul Manan, M Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 200), h 75.

¹³Sayuti Thalib, *Hukum Kerkeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 83.

- a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
 - b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing
 - c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
2. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk :
- a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 - b. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
- a. Harta milik bersama.
 - b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
 - c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan Pengadilan Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

Harta bersama atau gono-goni ini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.

3. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

4. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya,”.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan Pengadilan.

D. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian lapangan (*Feld Research*) yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama yang ada di kota Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) menggunakan studi kasus menggunakan hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang di berlakukan pada peristiwa hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normative yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah di tentukan. penerapan tersebut dapat diwujudkan Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realiasi pelaksanaan ketentuan

ketentuan hukum normative yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

3. Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.

C. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, baik informan maupun responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen-dokumen yang berisi informasi penting.

3. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu Kantor-kantor Pemerintahan Pengadilan Agama kota Makassar. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian terhadap aktivitas di Kantor Pengadilan Agama Makassar?
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu Hakim dan Notulen yang pernah menangani kasus-kasus pembagian harta bersama setelah perceraian?

E. Instrumen Penelitian

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni: peraturan perundang-undangan, Observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian yang berkaitan dengan penulisan ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar

I. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada

dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

II. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

a) Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan.

b) Keadaan Gedung

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m² untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M² dan Luas Bangunan 1.887,5 M².

c) Keadaan Pegawai dari Masa ke masa

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma.

Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya

jumlah Volume perkara. Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa :

Ketua Pertama	: K.H. Chalid Husain Periode Tahun 1960 s/d Tahun 1962
Ketua Kedua	: K.H. Syekh Alwi Al Ahdal Periode Tahun 1962 s/d Tahun 1964
Ketua Ketiga	: K.H. Haruna Rasyid Periode Tahun 1964 s/d Tahun 1976
Ketua Keempat	: K.H. Chalid Husain Periode Tahun 1976 s/d Tahun 1986
Ketua Kelima	: Drs. H. Jusmi Hakim, S.H Periode Tahun 1986 s/d Tahun 1996
Ketua Keenam	: Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H Periode Tahun 1996 s/d Tahun 1998
Ketua Ketujuh	: Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H Periode Tahun 1998 s/d Tahun 2004
Ketua Kedelapan	: Drs. H. M. Tahir R, S.H. Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2005
Ketua Kesembilan	: Drs. Anwar Rahmad, M.H. Periode Tahun 2005 s/d Tahun 2008
Ketua Kesepuluh	: Drs. Khaeril R, M.H. Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2010
Ketua Kesebelas	: Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H Periode Tahun 2010 s/d (Sekarang)

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Makassar

Banyak cara yang dapat dipergunakan untuk menentukan sesuatu harta benda termasuk harta bersama atau harta bawaan/pribadi. Demikian pula halnya dengan besarnya pembagian masing-masing pihak yang berhak atas harta bersama di maksud. Penetapan harta benda menjadi harta bersama, dapat dilakukan melalui upaya pembuktian. Surat-surat kepemilikan dan nota-nota pembelian, serta saksi-saksi dan petunjuk dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana bagi Hakim untuk memberikan keyakinan dalam penetapan harta bersama.

Harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, terhitung sejak saat akad nikah sampai dengan setelah putusan perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Kecuali terhadap harta benda diperoleh karena warisan, hadiah dan hibah tidak termasuk harta bersama melainkan menjadi harta pribadi dan tergolong harta bawaan. Tanah dan rumah / bangunan ataupun emas yang dijadikan mahar tidak termasuk harta bersama, sekalipun diperoleh pada waktu akad nikah dilangsungkan, karena bersifat pemberian halal calon suami terhadap isterinya. Menurut Yasim Irba salah seorang Hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar bahwa :

"Bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad nikah, karena itu termasuk kategori harta bersama, sekalipun keberadaannya pada waktu akad nikah dilangsungkan".¹⁴

Berdasarkan pernyataan responden di atas, maka khusus harta benda yang diberikan kepada istri sebagai mahar tidak termasuk kategori harta bersama, sehingga

¹⁴Yasim Irba. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Wawancara, tanggal, 30 Oktober 2014.

tidak dibagi ketika pemutusan perkawinan karena perceraian. Pembagian harta benda yang bersumber dari mahar, hanya sebagai harta warisan bukan harta bersama.

Adapun tata cara atau prosedur untuk menetapkan / membagi harta bersama kepada masing-masing pihak yang berhak dapat melalui bantuan pejabat Kantor Pengadilan Agama setempat, khususnya bagi mereka yang beragama Islam. Lain halnya bagi yang non muslim atau salah satunya tidak beragama Islam, maka penyelesaian penetapan dan pembagian harta bersama dapat dilakukan atas bantuan Peradilan Umum/Negeri.

Penyelesaian melalui Lembaga Peradilan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan yang di dalamnya disebutkan dengan jelas keberadaan harta yang dimaksud, baik kepemilikan, harta ataupun cara dan sumber dana yang dipergunakan untuk mengadakan/membeli barang yang bersangkutan.

Semua barang yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan, tergolong ke dalam harta bersama asalkan barangdimaksud tidak termasuk harta bawaan atau harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Atas nama siapa saja yang tercatat sebagai pembeli, atas usaha siapa (suami/isteri) sehingga barang itu ada sepanjang ikatan perkawinan tergolong ke dalam harta bersama.

Misalnya sebuah rumah yang dibeli dan dicatat ke dalam nama sang suami sebagai pemilik, sepanjang perolehannya masih dalam ikatan perkawinan maka termasuk harta bersama. Demikian pula halnya dengan sebuah mobil misalnya yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan termasuk harta bersama, walaupun dalam nota pembelian tercatat atas nama sang istri, tetapi haruslah dibagi menurut hukum harta bersama dan tidak sebagai harta bawaan/pribadi yang dibagi melalui Lembaga Pewarisan. Kaitannya dengan hasil yang diperoleh dari usaha bersama suami/istri

karena penghasilan harta bawaan, sepanjang penghasilan dimaksud ada ketika perkawinan berlangsung dikategorikan pula sebagai harta bersama.

Berdasarkan hal di atas, maka tolak ukur untuk menetapkan barang sebagai harta bersama, adalah akad nikah. Apabila ada akad nikah dan selama pernikahan masih berlangsung serta belum dilakukan pembagian harta bersama, maka semua barang yang ada tersebut harta bersama terkecuali yang dimaksud pasal 35 ayat (2) dan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 87 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak termasuk harta bersama.

Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, berdasarkan hasil penelitian penulis secara langsung pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, diperoleh data eksistensi harta bersama sebagai salah satu fenomena hukum yang sudah ada dikenal sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Yasim Irba salah seorang Hakim pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (wawancara tanggal 30 oktober 2014) bahwa :

"Persoalan mengenai harta bersama sudah ada atau sudah dikenal oleh masyarakat, jauh sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".¹⁵

Lebih lanjut beliau menyatakan, sebagai berikut:

"Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama tunduk pada hukum adat setempat, disamping pengaturannya berdasarkan URF menurut Hukum Islam".¹⁶

¹⁵Yasim Irba. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2014.

¹⁶Yasim Irba. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Wawancara, tanggal 30 Oktober 2014.

Sedangkan menurut/penjelasan Amiruddin salah seorang Panitera pada Pengadilan Agama Kelas IA bahwa:

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, merupakan landasan hukum yang bersifat universal, dan disamping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terhadap pengaturan harta bersama. Namun sebelumnya, ketentuan harta bersama tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, masyarakat bebas memilih Peradilan yang dipandang cocok untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya berkenaan dengan pembagian harta bersama".¹⁷

Memperhatikan dari ketiga praktisi hukum di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa harta bersama sebagai pranata hukum sudah ada dan dikenal oleh masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan secara nasional. Akan tetapi, pengaturannya masih bersifat pluralisme, diatur pula dalam hukum Islam yang disebut dengan Urf.

Pengaturan harta bersama di dalam berbagai lingkungan hukum, serta diberikannya dispensasi bagi pemberlakuan hukum adat dan Urf dalam rangka penyelesaian setiap permasalahan berkenaan dengan pembagian dan penetapan harta bersama. Hemat penulis, bahwa pada waktu itu belum ada kepastian hukum terhadap harta bersama.

Kebebasan masyarakat memilih hukum yang akan diberlakukan untuk dirinya dalam rangka menyelesaikan permasalahan harta bersama, tentu bagi orang yang menentukan pilihan hukum senantiasa berusaha mencari dan memilih norma hukum yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, walaupun dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sehingga perlindungan hukum yang ada

¹⁷Amiruddin. Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Makassar, Wawancara, Tanggal 30 oktober 2014.

pada waktu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum diberlakukan ternyata tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Amiruddin selaku Panitera pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam keterangannya kepada penulis, bahwa:

"Sebagian manusia mempunyai sifat materialistis dan serakah serta berusaha memperoleh harta benda sebanyak mungkin, oleh karena itu apabila diperhadapkan dengan pembagian harta bersama, biasanya memilih penerapan norma hukum yang kemungkinannya dapat memberikan keuntungan bagi dirinya tanpa memikirkan keuntungan dan kerugian pihak lain.¹⁸

Berkenaan dengan pernyataan responden di atas, maka dapat diketahui bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, maka masyarakat hukum yang mempunyai permasalahan dengan pembagian harta bersama dapat mencari perlindungan hukum melalui lembaga Peradilan, namun demikian perlindungan hukum yang diberikan pada waktu yang belum mencerminkan adanya kepastian hukum, oleh karena masih dimungkinkan diterapkan berbagai lingkungan hukum, bagi hukum adat ataupun norma hukum Islam yang tergolong ke dalam *urf*.

Berdasarkan ketidakpastian hukum tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 35 dengan tegas diatur bahwa, harta bersama yaitu keseluruhan harta benda baik benda bergerak maupun benda tetap termasuk hak dan kewajiban yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan termasuk pula harta bersama, dan hadiah serta harta pribadi dari masing-masing pihak.

Dari data yang diperoleh melalui Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, bahwa selama waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun

¹⁸Amiruddin. Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Makassar, Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2014.

2013 tercatat 159 perkara yang diputuskan, yang menyangkut pembagian harta bersama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel1.
Data Tentang perkara Pembagian Harta Bersama Kantor Pengadilan Agama
Kelas1A Makassar Dari Tahun 2008-2013

No	Tahun	Banyakperkara
1	2008	11
2	2009	17
3	2010	28
4	2011	31
5	2012	33
6	2013	39
Jumlah		159

Sumber Data:Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2014

Memperhatikan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa selamakurun waktu enam tahun terakhir (2008-2013) tercatat pada tahun 2008 ada 11 perkara 2009 ada 17 perkara pembagian harta bersama ,tahun 2010 ada 28 perkara ,tahun 2011 ada 31 perkara ,tahun 2012 ada 33 perkara ,dan pada tahun 2013 tercatat 39 perkara.

Kaitannya dengan hal di atas, penyelesaian perselisihan perkara pembagian harta bersama tidak selamanya diajukan secara terpisah atau tunggal, akan tetapi sebagian ada pula yang diajukan secara penggabungan dengan perceraian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Data Tentang Cara Penyelesaian Perkara Pembagian Harta (Bersama Pada Kantor
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 2008-2013)

No	Tahun	Gugatan Tunggal	Penggabungan	Jumlah
1	2008	4	7	11
2	2009	7	10	17
3	2010	3	25	28
4	2011	5	26	31
5	2012	4	29	33
6	2013	11	28	39
Jumlah		34	125	159

Sumber data Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2014

Data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa harta bersama pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, tercatat 34 perkara diajukan melalui gugatan tunggal, sedangkan untuk penggabungan perkara harta bersama dengan perceraian tercatat 125 perkara.

Gugatan tunggal pembagian harta bersama dalam kurun waktu enam tahun yakni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 yang paling banyak terjadi pada tahun 2013 yaitu 11 perkara, pada tahun 2010, 3 perkara, sedangkan pada tahun 2009, ada 7 perkara, tahun 2008, ada 4 perkara, tahun 2011, ada 5 perkara dan tahun 2012 hanya 4 perkara.

Lain halnya dengan penggabungan perkara perceraian dengan pembagian harta bersama dalam kurun waktu enam tahun yakni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, tercatat pada tahun 2012 merupakan paling banyak yakni 29 perkara sedangkan yang paling minim terjadi pada tahun 2008 hanya terjadi 7 perkara. Yasim

Irba, salah seorang Hakim pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, menjelaskan bahwa :

“Adanya gugatan tunggal dan penggabungan perkara di dalam menyelesaikan suatu sengketa pembagian harta bersama, karena Undang-undang sendiri yang memberikan peluang”.¹⁹

Amiruddin :selaku Panitera pada Pengadilan Agama Makassar (Wawancara tanggal 31 Oktober 2014), menjelaskan bahwa :

"Undang-undang tidak membatasi pencarian keadilan dalam rangka pembagian harta bersama, gugatan dapat diajukan secara tunggal dan khusus untuk pembagian harta bersama dan dapat pula gugatan diajukan bersama dengan gugatan perceraian".²⁰

Berdasarkan uraian di atas, hemat penulis bahwa adanya pencari keadilan yang mengajukan gugatan tunggal dan penggabungan perkara harta bersama dengan perceraian adalah sudah benar dan tetap. Lebih lanjut dikatakan Amiruddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar bahwa :

"Apabila diteliti lebih lanjut, akan diketahui gugatan tunggal yang secara khusus mempermasalahkan pembagian harta bersama dilakukan oleh para ahli waris yakni suami isteri bersama anak-anaknya, diajukan oleh suami dan ada pula yang dimohon oleh isteri agar harta bersama ikut pula diputuskan bersama-sama dengan pemutusan perkawinan".²¹

Ahli waris (suami isteri) beserta anak-anak yang mengajukan gugatan pembagian harta warisan, karena salah satu pihak (suami atau isteri) telah meninggal dunia lebih dahulu, dan selama ikatan perkawinan berlangsung ada harta bersama ditinggalkan Jadi, cara penyelesaiannya lebih dahulu ditetapkan harta benda tersebut

¹⁹Yasim Irba. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2014.

²⁰Amiruddin. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Makassar Wawancara, tanggal 31 Oktober 2014.

²¹Amiruddin. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Makassar, Wawancara, tanggal 31 Oktober 2014.

sebagai harta bersama dan dibagi menurut bagiannya masing-masing, yakni suami/isteri masing-masing berhak atas sebagian, dan setelah itu harta bersama yang sudah dibagi untuk bagian yang telah meninggal dunia secara ex officio atau pihak-pihak yang bersangkutan dapat menunjuk ahli waris lain sebagai gantinya, atau Hakim dapat mengangkat ahli waris lain yang berhak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, bahwa diantara 159 perkara harta bersama dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, tercatat 129 perkara yang diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap sedangkan selebihnya 30 perkara masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Data Tentang Perkara Pembagian Harta Bersama yang Diputuskan dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Dari Tahun 2008 - 2013.

No	Tahun	Banyak perkara harta bersama		Jumlah
		Diputuskan	Tersisa	
1	2008	8	3	11
2	2009	12	5	17
3	2010	20	8	28
4	2011	27	4	31
5	2012	29	4	33
6	2013	33	6	39
Jumlah		129	30	159

Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2014

Sehubungan dengan angka-angka dalam tabel di atas, diketahui bahwa perkara pembagian harta bersama tidak selamanya dapat diselesaikan dalam waktu

cepat, tetapi masih ada yang perlu pemeriksaan yang memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama.

Selama waktu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, tercatat 129 perkara harta bersama yang selesai diputuskan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap/ pasti pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Sedangkan selebihnya (tersisa) masih perlu diperiksa lebih lanjut dengan mempergunakan upaya hukum biasa dan luar biasa, seperti banding dan kasasi bahkan ada pula yang menyatakan pencabutan perkaranya, sehingga tidak perlu diputuskan oleh Hakim/Pengadilan.

Dengan demikian, tata cara prosedur penetapan dan pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berikut penjelasannya sepanjang mengenai peraturan menurut hukumnya masing-masing, termasuk pula hukum acaranya sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berikut berbagai peraturan pelaksanaannya.

C. Tata Cara Prosedur Pelaksanaan dan Pembagian Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Sebagaimana pada uraian terdahulu, bahwa banyak cara yang dapat dipergunakan untuk menentukan sesuatu harta benda termasuk harta bersama atau harta bawaan/pribadi. Demikian pula halnya dengan besarnya pembagian masing-masing pihak yang atas harta bawaan bersama dimaksud. Penetapan harta benda menjadi harta bersama, dapat dilakukan melalui upaya pembuktian. Surat-surat kepemilikan dan nota-nota pembelian, serta saksi-saksi dan petunjuk dapat

dipergunakan sebagai salah satu sarana bagi Hakim untuk menentukan keyakinan dalam rangka penetapan harta bersama.

Harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, terhitung sejak saat akad nikah sampai dengan setelah pemutusan perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Kecuali terhadap harta benda diperoleh karena warisan, hadiah dan hibah tidak termasuk harta bersama melainkan menjadi harta pribadi dan tergolong harta bawaan. Tanah dan rumah/bangunan, ataupun emas yang dijadikan mahar tidak termasuk harta bersama, sekalipun diperoleh pada waktu akad nikah dilangsungkan, karena bersifat pemberian halal calon suami terhadap isterinya.

Yasim Irba salah satu Hakim pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam keterangannya kepada penulis, bahwa :

"Mahar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad nikah, karena itu tidak termasuk kategori harta bersama, sekalipun keberadaannya pada waktu akad nikah dilangsungkan."²²

Dengan demikian, maka khusus harta benda yang diberikan kepada istri sebagai mahar tidak termasuk kategori harta bersama, sehingga tidak dapat dibagi ketika terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian. Pembagian harta benda yang bersumber dari mahar, hanya dapat dilakukan kepada ahli waris (tidak termasuk suami) sebagai harta warisan bukan harta bersama.

Kaitannya hal tersebut, pembagian harta bersama setelah adanya perceraian dapat dibagi 2 (dua) karena menurut pada ketentuan pokok dalam Undang-Undang di mana barang siapa saja yang memperoleh penghasilan antara penggugat dan tergugat, namun kadangkala dalam suatu persidangan pada perceraian yang mana

²²Yasim Irba. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Wawancara, Tanggal 31 Oktober 2014.

pembagian harta bersama, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung antara lain :

- 1) Dimana hanya suami kerja, sedangkan si isteri tidak dibolehkan mempunyai penghasilan sendiri.
- 2) Di mana si isteri yang kerja karena si suami pada dasarnya tidak mempunyai pekerjaan atau malas untuk mencari pekerjaan.
- 3) Karena adanya adat kebiasaan dari suatu daerah tersebut(URT).

Adapun tata cara dan prosedur untuk menetapkan/membagi harta bersama kepada masing-masing pihak yang berhak dapat melalui bantuan Kantor Pengadilan Agama setempat bagi mereka yang beragama Islam. Lain halnya bagi yang non muslim atau salah satunya tidak beragama Islam, maka penyelesaian penetapan dan pembagian harta bersama dapat dilakukan atas bantuan pasal Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).

Penyelesaian melalui Lembaga Peradilan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan yang di dalamnya disebutkan dengan jelas keberadaan harta dimaksud, baik kepemilikan, harta maupun cara dan sumber dana yang dipergunakan untuk mengadakan/membeli barang yang bersangkutan.

Semua barang yang suami atau isteri peroleh selama dalam ikatan perkawinan, tergolong ke dalam harta bersama asalkan barang dimaksud tidak termasuk harta bawaan atau milik pribadi masing-masing. Atas nama siapa yang tercatat sebagai pembeli, atas usaha siapa (suami/isteri) sehingga barang itu ada sepanjang ikatan perkawinan tergolong ke dalam harta bersama. Sebuah mobil yang dibeli dan dicatat ke dalam nama sang suami sebagai pemilik, sepanjang perolehannya masih dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama. Demikian pula

dengan rumah dan perabotnya yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan termasuk harta bersama, walaupun dalam nota pembelian tercatat atau nama sang isteri, karena itu haruslah dibagi menurut hukum harta bersama dan tidak sebagai harta bawaan/pribadi yang dibagi melalui lembaga pewarisan.

Selanjutnya mengenai hasil yang diperoleh dari usaha bersama suami/isteri karena penghasilan harta bawaan, sepanjang penghasilan dimaksud ada ketika perkawinan masih berlangsung dikategorikan pula sebagai harta bersama. Tolak ukur untuk menetapkan sesuatu barang sebagai harta bersama, yakni akad nikah. Apabila ada akad nikah dan selama pernikahan masih berlangsung serta belum dilakukan pembagian harta bersama, maka semua barang yang ada tersebut termasuk harta bersama, terkecuali yang dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak termasuk harta bersama melainkan harta bawaan.

D. Kendala-Kendala Yang Timbul terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Makassar

Memperhatikan pembahasan pada bagian pelaksanaan pembagian harta bersama di kota Makassar, maka kendala-kendala yang terjadi yaitu tampak kurang memahami bahwa harta bersama bagi seseorang yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing istri mempunyai harta bersama dengan suaminya yang terpisah dengan harta bersama suami dengan istri-istrinya yang lain, sebagaimana terungkap dalam pertimbangan hukum Pengadilan. Kemudian dapat pula diketahui, bahwa benar harta bersama dapat dijadikan jaminan utang oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lain, namun tergugat pada waktu menjadikan agunan utang

harta bersama yang diperoleh dengan istri yang keempat atau penggugat, ternyata tergugat tidak mendapat persetujuan dengan istri pertamanya, oleh karena itu maka segala utang yang terbit karena persetujuan istri pertama haruslah dipandang sebagai utang pribadi tergugat yang harus dipertanggungjawabkan pelunasannya oleh tergugat dengan isteri yang pertama sebagai pihak yang memberikan persetujuan tidak kepada penggugat selaku isteri yang keempat.

Pertimbangan hukum yang demikian, menurut hemat penulis adalah benar dan tepat, oleh karena itu pula maka suami (tergugat) dibebani kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pembayaran/pelunasan utang secara pribadi yang diambil dan diperhitungkan dari bagian harta bersama (Obyek sengketa).

Harta bersama yang terpisah dari harta bersama dengan isteri pertama, kedua dan ketiga karena perolehannya jelas yakni setahun setelah akad pernikahan dilangsungkan, serta berasal dari usaha bersama antar Penggugat selaku isteri dengan tergugat selaku suami, contoh Kedua petak ruko yang terletak di Kompleks Pasar Mirah Panakkukang Mas Makassar pada Blok B5 dan B5 nyata dan terbukti secara sah dan meyakinkan perolehannya dari hasil penjualan coto sebagai usaha bersama penggugat dengan tergugat. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang mempertimbangkan kedua petak ruko tersebut sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, terlepas dari berdiri sendiri dari harta bersama tergugat dengan isteri-isterinya yang lain (isteri pertama, kedua dan ketiga).

Pertimbangan, hukum yang demikian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta persesuaian pula dengan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, bahwa semua harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama terhitung sejak

akad pernikahan sampai terjadinya pemutusan perkawinan dan karena itu terpisah dari harta bersama dengan isteri-isteri yang lain.

Mengenai sebuah mobil sedan Accord yang menurut dalil gugatan penggugat termasuk harta bersama dengan tergugat, karena diperoleh selama penggugat masih sebagai isteri dan tergugat, kemudian tergugat jual dan hasil penjualannya dibelikan kembali sebuah mobil ex salon warna merah. Oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai harta benda yang tidak termasuk harta bersama karena tidak ada alat-alat bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil penggugat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa harta tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai harta bersama karena tidak dapat meyakinkan Hakim bahwa benar harta dimaksud tergolong harta bersama yang harus dibagi sama rata antara penggugat dan tergugat.

E. Putusan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama atau Gono-Gini di Pengadilan Agama Makassar

Seperti yang kita ketahui dalam kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama setelah dilaksanakannya sidang pertama dimana Hakim memberikan kepada pihak penggugat dan tergugat atau kuasa hukum masing-masing untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak, apakah perkaranya bisa di selesaikan di luar Pengadilan. Jika tidak dapat di selesaikan secara mediasi, maka Hakim harus melanjutkan perkara tersebut sampai keluarnya putusan. Menurut Yasim salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Makassar mengatakan:

“semua putusan yang kami putuskan baik perkara perceraian, harta bersama, ataupun kasus gabungan keduanya, itu sudah tepat dan sesuai dengan prosedur yang berdasarkan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini

ketika putusan diambil sudah sesuai Undang-undang yang berlaku, maka putusan itu sudah bisa dikatakan putusan yang sudah berkepastian hukum.²³

Tetapi kadang pula ada salah satu pihak yang merasa di rugikan baik dari pihak tergugat maupun penggugat tidak terima dengan hasil putusan tersebut dengan alasan ada yang terlalu di rugikan atau tidak adil. Kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Kemudian Bapak Yasim melanjutkan keterangannya bahwa:

“yang dimaksud dengan adil yaitu membagi atau memberi sesuai dengan haknya yang telah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku, tetapi kadang pula baik dari tergugat mau penggugat ingin adil menurut rasa beda, yang dimaksud adil menurut rasa yaitu dimana adil dikatakan sesuai dengan hasil jeripayahnya”²⁴

Jadi dalam hal ini penulis dan Responden bersependapat bahwa: semua putusan diputuskan oleh Hakim sudah terlaksana dengan baik yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

²³Yasim Irba. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Wawancara, Tanggal 31 Oktober 2014.

²⁴Yasim Irba. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Wawancara, Tanggal 31 Oktober 2014.

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang diidentifikasi pada bab terdahulu, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian Di Pengadilan Agama Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak terwujud sepanjang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan tidak termasuk bawaan dan harta pribadi adalah harta bersama, sebagaimana diatur secara explicit dalam Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 serta Pasal 65 ayat (1) huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut pelaksanaannya.
2. Kendala-kendala yang terjadi terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama yaitu:
 - a. Para pihak kurang memahami harta bersama;
 - b. Kadang harta bersama dijadikan agunan salah satu pihak di perjanjian kredit;
 - c. Pembuktian kepemilikan harta bersama.
3. Putusan hakim dalam pembagian harta bersama atau gono-gini di Pengadilan Agama: semua putusan hakim yang mengenai harta bersama sudah terlaksana dengan baik, karena telah berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku baik Undang-undang No 1 tahun 1974.

B. *Saran*

Berkenan dengan beberapa kesimpulan di atas, selanjutnya diajukan beberapa saran yang dapat menjadi bahan masukan dalam rangka pembinaan hukum di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang tersendiri dan secara khusus mengatur berbagai aspek berkenan dengan harta bersama, didalam Undang-Undang tersebut terangkum keseluruhan norma hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga pengaturan harta bersama kelak lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
2. Penyelesaian sengketa penentuan dan penetapan sekaligus pembagian harta bersama bagi masing-masing pihak, hendaknya lebih diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila upaya kekeluargaan tidak berhasil barulah melalui bantuan lembaga peradilan. Oleh karena itu, maka pembuktian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan kepada Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju.
- Hamid, Zahri. 1978. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan*, Seri Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2005.
- Jahani, Libertus. 2008. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Manan, Abdul dan Fauzan, M. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Perundang-undangan
- Pittlo, 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1990. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press.
- Ramulyo, M Idris. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rofiq, Ahnad. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Satrio, J. 2008. *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sitompul, Anwar. 1984. *Dasar-dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*, Armico, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1999. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soermiyati, 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty*, Yogyakarta.
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Visimedia*, Jakarta.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kerkeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.